

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024



**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

A. KAK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
B. KAK Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2
C. KAK Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	3
D. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4
E. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7
F. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10

A. KAK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Latar Belakang : Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pelayanan tugas dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan anggaran perjalanan dinas baik ke dalam maupun luar daerah. Anggaran perjalanan dinas Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dengan baik, agar mendapatkan keluaran berupa terfasilitasinya kinerja PNS yang efektif dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
- Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah agar terfasilitasinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam rangka menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	176.595.000
1.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	147.000.000
2.	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	27.475.000
3.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	1.060.000
4.	Survei IKM Biro	1.060.000
B.	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	210.000.000
1.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	210.000.000

- Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
 Sumber Dana : APBD

B. KAK Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Latar Belakang : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menangani administrasi pelayanan di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam adalah Program Administrasi Umum dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya program dan kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan surat menyurat dan kearsipan serta kepegawaian di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan pelayanan surat menyurat dan kearsipan serta kepegawaian, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.
- Maksud dan Tujuan : Maksud : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
Tujuan : memberikan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan kebutuhan surat menyurat hingga proses surat menyurat selesai, serta penyediaan kebutuhan dalam pengelolaan kearsipan dan kepegawaian.

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	10.000.000
1.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	6.491.000
2.	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	3.509.000
B.	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	15.000.000
1.	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	15.000.000

- Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
Sumber Dana : APBD

C. KAK Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Latar Belakang :
Maksud dan Tujuan :

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	400.000.000
1.	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	400.000.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
Sumber Dana : DBHCHT

D. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- Latar Belakang : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan terdiri dari 3 indikator sub kegiatan meliputi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang Pertanian, Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang Ketahanan pangan, dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang Kelautan, dan Perikanan
- Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 terdapat isu strategis Provinsi Jawa Tengah meliputi :
1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
 3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis
- Permasalahan Pembangunan Jawa Tengah pada bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan antara lain :
1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian
 2. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi
 3. Masih rendahnya nilai tukar petani dan nelayan di Jawa Tengah
 4. Masih belum optimalnya pemanfaatan kartu tani dan masih perlu pengembangan kartu tani untuk mewujudkan peta Pertanian Jateng melalui Agromap
 5. Masih perlu mendorong implementasi sistem logistik daerah (sislogda)
 6. Masih dibutuhkan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mendukung peningkatan produksi di Jawa Tengah
 7. Masih belum optimalnya pemanfaatan kartu nelayan dan masih perlu pengembangan fungsi kartu nelayan untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan
 8. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian
 9. Masih rendahnya nilai tukar petani dan nelayan di Jawa Tengah
 10. Masih belum optimalnya pemanfaatan kartu tani dan masih perlu pengembangan kartu tani untuk mewujudkan peta Pertanian Jateng melalui Agromap
 11. Masih perlu mendorong implementasi sistem logistik daerah (sislogda)

12. Masih dibutuhkan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mendukung peningkatan produksi di Jawa Tengah
13. Masih belum optimalnya pemanfaatan kartu nelayan dan masih perlu pengembangan fungsi kartu nelayan untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan
14. Masih perlu peningkatan pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
15. Masih perlunya penguatan kelembagaan petani dan nelayan berbasis korporasi.

Prioritas Pembangunan Jawa tengah pada Tahun 2024 berfokus pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Maksud dan Tujuan

: Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan :

1. Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian
2. Peningkatan peran Komisi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mendukung peningkatan produksi di Jawa Tengah
3. Peningkatan pemberdayaan nelayan, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan
4. Peningkatan pemanfaatan kartu tani dan pengembangan kartu tani untuk mewujudkan peta pertanian Jateng untuk mendukung sistem logistik daerah (sislogda)

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan :

1. Menyiapkan kebijakan (Policy Brief) yang dapat diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
3. Untuk mengetahui peningkatan efektifitas

Pelaksanaan Fungsi dan Manajemen Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, terkait dengan tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	265.314.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	79.740.000
2.	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	79.897.000
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	105.677.000
B.	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	600.000.000
1.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	600.000.000
C.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	199.880.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	141.395.000
2.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	30.975.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	27.510.000
D.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	180.880.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	81.817.000
2.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	45.786.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	53.277.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
 Sumber Dana : APBD, DBHCHT

E. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Latar Belakang : Dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023, melalui Forum Perangkat Daerah telah disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sebagai sarana dalam melanjutkan visi dan misi pembangunan daerah pada masa transisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam RPD diarahkan pada tujuan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” yang ditujukan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat dengan sasaran meliputi :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Urusan energi dan sumber daya mineral dan Lingkungan hidup dan Kehutanan merupakan klasifikasi urusan konkuren pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi yang secara signifikan mengarahkan agar proporsi konsumsi energi bergeser untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar non terbarukan karena mengingat keterbatasan cadangan migas dan penggunaan energi hijau yang masih belum optimal. Diharapkan mampu bergeser dalam penggunaan energi baru terbarukan dan penerapan konservasi energi dan sumber daya energi dengan melaksanakan manajemen energi bagi pengguna energi dan pengguna sumber energi. Sehingga untuk percepatan transisi energi ini dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan percepatan serta menciptakan lingkungan hidup yang lestari dan mampu menghadapi perubahan iklim dengan mengelola lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tingginya kerusakan lingkungan perlu segera dilakukan penanganan penyelamatan yang pelaksanaannya perlu sinergitas antara Pemerintah Pusat , Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dilaksanakan untuk pengelolaan rumpun Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

isu strategis pembangunan Jawa Tengah dengan beberapa isu strategis pembangunan meliputi Ketahanan air, Ketahanan lahan, Ketahanan energi dan Ketahanan perubahan iklim.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan pada sektor Energi Sumber Daya Mineral dan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan
2. Masih banyaknya pemanfaatan air tanah
3. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan
4. Pertumbuhan demand tenaga listrik yang lebih lambat dari supply penyediaan tenaga listrik, serta
5. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bahaya geologi.
6. Masih tingginya tingkat pencemaran sungai
7. Meningkatnya Jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan
8. Meningkatnya emisi GRK yang didominasi oleh sektor energi dan limbah
9. Kerusakan pesisir dan Kerentanan Perubahan Iklim
10. Lahan kritis yang menyebabkan fungsi hidrologis DAS kurang optimal
11. Kerusakan hutan yang diakibatkan pencurian dan kebakaran hutan masih ada walaupun telah menurun
12. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan
13. Tuntutan pemanfaatan hasil hutan secara lestari

Terkait dengan sektor energi sumber daya mineral diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses listrik, energi dan pemanfaatan energi alternatif serta peningkatan konservasi air tanah dan kegeologian.

Demikian juga terkait isu-isu strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang saat ini penanganannya masih belum optimal dan belum sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka masih memerlukan sinkronisasi dan sinergitas seluruh pihak untuk menyelaraskan pembangunan yang berbasis lingkungan dengan pemanfaatan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

- :
1. Maksud
 - a) Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan kebijakan bidang LHK ESDM.
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder

- terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang LHK ESDM
- c) Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang LHK ESDM.
2. Tujuan
 - a) Menyiapkan usulan kebijakan (policy brief) bidang LHK ESDM
 - b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang LHK ESDM
 - c) Meningkatkan sibergitas dan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang LHK ESDM

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	280.000.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400.000.000
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85.105.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85.350.000
B.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	257.760.000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	46.980.000
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	128.838.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	81,942.000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
 Sumber Dana : APBD

F. KAK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Latar Belakang : Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 terdapat isu strategis Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Permasalahan Pembangunan Jawa Tengah pada bidang infrastruktur antara lain :

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dengan permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah maupun korban bencana ataupun korban kebijakan pembangunan pemerintah, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.
2. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur, dengan salah satu penyebab yakni Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah. Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah
3. masih adanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Sampai dengan tahun 2022, kondisi jalan provinsi yang telah sesuai standar dengan lebar tujuh meter dan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton sebesar 41,56 persen. Sedangkan jalan provinsi dengan kondisi permukaan rusak berat sebesar 4,67 persen dan rusak ringan sebesar 2,84 persen.
4. Masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat

- terjadi bencana;
5. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian
 6. belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir

Prioritas Pembangunan Jawa tengah pada Tahun 2024 berfokus pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Maksud dan Tujuan

: Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air adalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab./Kota dan Lembaga-lembaga terkait dalam rangka Sinergitas penyusunan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab./Kota dan Lembaga-lembaga terkait dalam rangka Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab./Kota dan Lembaga-lembaga terkait guna mendukung tercapainya peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air adalah :

1. Menyiapkan kebijakan (Policy Brief) yang dapat diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SKPD Dinas

PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PUSDATARU, dan DISPERAKIM), terkait dengan kebijakan prioritas strategis nasional (pusat) yang dilakukan di daerah dan menjadi prioritas Kepala Daerah serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, antara lain: Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah.

3. Untuk mengetahui peningkatan efektifitas Pelaksanaan Fungsi dan Manajemen Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (SKPD Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PUSDATARU, dan DISPERAKIM) Prov. Jateng, terkait dengan tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah

Indikator Sub Kegiatan dan Rincian Sub Kegiatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A.	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	346,560,000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	184,156,000
2.	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	82,228,000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	80,176,000
B.	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	269,800,000
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	144,000,000
2.	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72,000,000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	53,800,000

Tanggal Pelaksanaan Mulai : 01-01-2024
 Tanggal Pelaksanaan Selesai : 31-12-2024
 Sumber Dana : APBD